LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====
Seri A No. 8
Tahun 1968.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 5 TAHUN 1963 (5/1963)

Tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta No. 06/Sks. III/DPRD/1963 tertanggal 22 Agustus 1963.
- Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur beberapa Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah, sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, maka sebagai "follow-up" dari Peraturan Daerah tersebut dipandang perlu segera mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai gaji pegawai dari perusahaan-perusahaan Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah;
2. Bahwa berhubung dengan masyarakat sosialis Indonesia kedudukan tenaga kerja adalah vital, maka didalam Peraturan Daerah ini tenaga kerja perlu diberi tempat dan penghargaan yang tepat dan layak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (yang disempurnakan);
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (yang disempurnakan);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 jo Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1961;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1962.

Mendengarkan: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 12 dan 17 September 1963 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan yang dibentuk dengan suatu Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dewan Perusahaan Daerah, ialah Dewan Perusahaan Daerah dalam Perusahaan Daerah yang bersangkutan;
5. S.S./S.B. dalam Perusahaan, ialah Serikat Sekerja/Serikat Buruh dalam Perusahaan Daerah yang bersangkutan;
6. Direksi, ialah Direksi dari Perusahaan Daerah yang bersangkutan;
7. Pegawai, ialah anggota Direksi/Pegawai/Pekerja yang bekerja pada Perusahaan Daerah, dengan pengangkatan tetap;
8. Gaji Pokok, ialah pokok dari gaji;
9. Gaji, ialah jumlah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi pegawai yang berhubungan dengan gajinya menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

Banyaknya gaji bagi tiap-tiap pegawai dari masing-masing Perusahaan Daerah diatur oleh Kepala Daerah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II. GAJI DAN JABATAN

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 21, maka kepada Pegawai Perusahaan diberikan gaji pokok serendah-rendahnya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 4.000,0 (empat ribu rupiah) sebulan.

Pasal 4.

Jabatan-jabatan dalam suatu Perusahaan dibagi dalam golongan I dan Golongan II dan golongan III, yang masing-masing golongan dibagi lagi dalam ruangan-ruangan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 5.

- (1) Syarat pengangkatan untuk jabatan dalam golongan I ialah ijazah sekolah rendah atau pengetahuan/pengalaman yang sederajat dengan itu.
- (2) Syarat pengangkatan untuk jabatan dalam golongan II ialah ijazah sekolah menengah atau pengetahuan/pengalaman yang sederajat dengan itu.
- (3) Syarat pengangkatan untuk jabatan dalam golongan III ialah ijazah sekolah tinggi atau pengetahuan/pengalaman yang sederajat dengan itu.
- (4) Untuk pekerjaan yang mengandung bahaya dan/atau risiko kerja dan/atau dilakukan dalam keadaan khusus atau memerlukan keahlian khusus atau bakat istimewa, Kepala Daerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatas.
- (5) Khusus untuk jabatan Direksi pengangkatannya dilakukan oleh Kepala Daerah sesudah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6.

Tiap golongan dan ruang tersebut dalam pasal 4 mempunyai gaji pokok terendah dan tertinggi menurut ketetapan Kepala Daerah.

Pasal 7.

Pembagian dalam golongan ruang termaksud dalam pasal 4 dan 6 diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8.

- (1) Anggota-anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pegawai/pekerja Perusahaan Daerah dari semua golongan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perusahaan serta S.S/S.B. yang bersangkutan.

BAB IV. SUSUNAN PEGAWAI

Pasal 9.

Susunan pegawai dalam suatu Perusahaan disesuaikan dengan Anggaran Perusahaan dan disahkan oleh Kepala Daerah sesudah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan dan S.S / S.B. dalam Perusahaan.

BAB V. TUNJANGAN

Pasal 10.

Kepada pegawai Perusahaan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, tunjangan perusahaan, tunjangan perusahaan tambahan tunjangan dan tunjangan lain menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 dengan pasal 15 Peraturan Daerah ini.

TUNJANGAN KELUARGA

Pasal 11.

- (1) Kepada pegawai yang beristeri/bersuami yang gaji pokoknya kurang dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebulan kebawah diberikan tunjangan isteri/suami sebanyak-banyaknya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dengan ketentuan tidak boleh melebihi gaji pokok.
- (2) Kepada pegawai yang beristeri/bersuami yang gaji pokoknya lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebulan diberikan tunjangan isteri/suami yang banyaknya akan diatur secara khusus oleh Kepala Daerah.

- (3) Kepada pegawai yang gaji pokoknya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebulan kebawah yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 25 tahun dan tidak/belum pernah kawin serta tidak mempunyai penghasilan sendiri, diberikan tunjangan anak sebanyak Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk tiap-tiap orang anak.
- (4) Kepada pegawai yang gaji pokoknya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebulan yang mempunyai anak dan atau anak angkat yang berumur, kurang dari 25 tahun dan tidak/belum pernah kawin serta tidak mempunyai penghasilan sendiri, diberikan tunjangan anak yang akan diatur oleh Kepala Daerah.
- (5) Tunjangan anak bagi anak hanya untuk seorang anak.
- (6) Jika suami/isteri kedua-duanya pegawai, tunjangan termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, hanya diberikan kepada pegawai yang pokok gajinya tertinggi.

TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM

Pasal 12.

Kepada pegawai diberikan tunjangan kemahalan sebanyak sama dengan tunjangan kemahalan umum yang berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

TUNJANGAN PERUSAHAAN

Pasal 13.

Kepada pegawai diberikan tunjangan perusahaan sebesar 50% dari gaji pokok sebulan.

TUNJANGAN PERUSAHAAN TAMBAHAN

Pasal 14.

Berhubung dengan pentingnya perusahaan, kedudukan serta tugas dalam perusahaan, kepada pegawai tertentu dapat pemberian tunjangan perusahaan tambahan yang jumlahnya tiap bulan tidak boleh melebihi 150% dari gaji pokok dan yang diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

TUNJANGAN TUNJANGAN LAIN

Pasal 15.

Demi untuk perkembangan dan sesuai dengan kebutuhan, keadaan serta kemampuan Perusahaan, Kepala Daerah dapat menentukan pemberian tunjangan-tunjangan lain kepada pegawai terutama yang dihubungkan dengan prestasi lebih, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16.

Kepada pegawai tertentu dapat diberikan emolumen-emolumen dan penghargaan lain yang diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 17.

Kepala Daerah sesudah mendengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengadakan Peraturan Upah yang tidak merupakan gaji tetap.

Pasal 18.

Kepala pegawai diberikan hak pensiun atau hak tunjangan yang bersifat pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII.
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19.

Kepada pegawai yang menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini mendapat gaji kurang dari yang diterimanya sekarang, diberikan gaji-gaji peralihan yang sama jumlahnya dengan gajinya sebelum Peraturan Daerah yang berlaku.

Waktu peralihan tidak boleh melebihi dua tahun.

Pasal 20.

Dalam waktu peralihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah mengatur penyesuaian gaji dari Perusahaan-Perusahaan Daerah yang dahulunya merupakan instansi-instansi dilakukan bagian dari instansi-instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 21.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau walaupun sudah diatur akan tetapi didalam pelaksanaannya ternyata memenuhi kesukaran prinsipil dengan alasan-alasan yang kuat dapat diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 10 September 1963.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta

Wakil Ketua,

ttd.

SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 8 Tahun 1968 Tanggal 27 Mei 1968.

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

MOELJONO MOELIADI, SH

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1963

Tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

PENJELASAN UMUM.

1. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan maksud pendirian tiap Perusahaan Daerah yang fungsional bagi pembangunan Daerah dalam rangka program umum Pemerintah yang telah ditegaskan oleh Manipol dan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960, maka Perusahaan Daerah selalu bertujuan untuk turut membangun ekonomi, dimana diutamakan kebutuhan Rakyat, ketenteraman dan kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pendirian Perusahaan Daerah itu juga bermaksud untuk mengurangi pengangguran dalam Daerah, sehingga sewajarnya bila pengambilan tenaga yang dibutuhkan selalu mengutamakan tenaga-tenaga pengangguran yang tidak berpenghasilan, dengan memberi kesempatan lebih dulu bagi penganggur dari veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat kebutuhan Perusahaan seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960.

2. Adanya suatu Peraturan Gaji yang sehat dan menarik merupakan salah satu unsur yang penting untuk dapat menciptakan

ketenteraman dan kesesnangan kerja dalam Perusahaan yang sangat diperlukan bagi pemeliharaan ketekunan bekerja dan aktivitas para pegawai guna mengembangkan daya produksi bagi kepentingan masyarakat dalam rangka ekonomi terpimpin.

3. Salah satu pasal dari tiap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pendirian sesuatu Perusahaan Daerah selalu ada yang menentukan bahwa kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan-penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Diantara hal-hal yang perlu diatur ialah soal gaji pada saat ini merupakan soal yang terpenting. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai Perusahaan Daerah yang memberikan tempat dan penghargaan yang tepat dan layak kepada tenaga kerja.
4. Peraturan Daerah ini juga dengan mengingat tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa suatu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi, yang satu sama lainnya berbeda-beda dimana penentuan tingkat penghasilan disandarkan atas kemampuan perusahaan dengan tidak boleh meninggalkan dasar-dasar yang bedrijfs - ekonomis.

Oleh karena pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai Pemerintah Daerah adalah pengabdian Negara, maka sepantasnya jika peraturan gaji Perusahaan Daerah mempunyai azas-azas persamaan dengan peraturan gaji pegawai Negeri yang berlaku, baik dalam soal imbalan, maupun dalam soal pemberian tunjangan dan lain-lain, segala sesuatu dengan batas kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk memberikan dorongan guna meningkatkan kenaikan produksi, maka dalam cara pemberian tunjangan perlu ditanamkan azas deferonsasi pada tunjangan yang bersifat bedrijfs - ekonomis, dan azas persamaan pada tunjangan-tunjangan yang bersifat sosial ekonomis (tunjangan isteri, anak dan sebagainya).

5. Perlu dihindari adanya suatu peraturan yang kaku, dan perlu dijamin adanya flexibilititeit yang dapat mengikuti sifat dan dinamika Perusahaan, sehingga memungkinkan pemberian penghasilan kepada karyawan berdasarkan atas produktivitas, keahlian dan kegairahan bekerja.

Perlu juga mendapat penghargaan pekerjaan yang didasarkan atas bertanya kerja, tenaga atau pikiran, bahaya lapangan kerja, risiko kerja, keahlian khusus dan bakat istimewa bersangkutan.

6. Peraturan ini memuat pokok-pokok dasar dari penggajian dan merupakan Peraturan induk sedang pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang dapat berbentuk peraturan/keputusan-keputusan Kepala Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Sudah jelas.
- Pasal 2 : Dalam mengatur gaji pegawai Perusahaan Daerah Kepala Daerah mendengarkan pendapat S.S./S.B. dan Dewan Perusahaan dari Perusahaan Daerah yang bersangkutan serta minta pertimbangan dari saham Daerah yang bersangkutan serta minta pertimbangan dari Seksi Perburuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 3 : Gaji pokok terendah Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sedang gaji pokok tertinggi yang dapat diberikan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan penerimaan penghasilan yang terlampau besar didalam Perusahaan.
- Pasal 4 : Sudah jelas.
- Pasal 5 : Sudah jelas.
- Pasal 6 : Gaji pokok tertinggi Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) hanya diberikan kepada pegawai tertinggi dari suatu Perusahaan Daerah yang terbesar, sehingga gaji pokok tertinggi suatu Perusahaan Daerah dapat berbeda dengan Perusahaan Daerah yang lain.
- Pasal 7 : a) Pembagian golongan dalam ruang-ruang supaya dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 200 Tahun 1961;
- b) Baik dalam membagi dalam ruang maupun dalam menetapkan gaji tiap pangkat/jabatan, Kepala Daerah terlebih dahulu mendengarkan pendapat S.S./S.B. dan Dewan Perusahaan dari Perusahaan Daerah yang bersangkutan dan mempertimbangkannya dengan Seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Urusan Kepegawaian/Perburuhan.
- Pasal 8 : Dalam pengangkatan pertama sebagai pegawai masalah ijazah merupakan salah satu syarat seperti tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- Dalam pengangkatan pangkat, pertimbangan-pertimbangan yang penting adalah kerajinan, keahlian, kepandaian/kebakatan, pengalaman jabatan dengan mengingat susunan (formasi) pegawai Perusahaan.
- Pasal 9 : Susunan pegawai Perusahaan haruslah efisien/sederhana sedang pengisiannya harus selalu

mengingat keadaan obyektif Perusahaan baik dalam hal kemampuan finansial, luas pekerjaan maupun sifatnya.

Pasal 10 : Sudah jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan anak ialah anak yang syah/yang disyahkan atau anak tiri, sedang anak angkat ialah bukan anak sendiri yang diangkat menurut hukum adopsi bagi keturunan Tiong Hoa atau yang diangkat menurut keputusan Pengadilan Negeri.

Yang dimaksud dengan suami-isteri kedua-duanya pegawai dalam ayat (6) pasal ini termasuk juga bila suami/isteri pegawai Perusahaan itu bekerja sebagai pegawai Negeri/Daerah atau Perusahaan-perusahaan Negara.

Pasal 12 : Tunjangan kemahalan umum dihitung atas dasar jumlah gaji pokok sebulan dengan tunjangan keluarga.

Pasal 13 : Tunjangan Perusahaan diberikan kepada setiap pegawai setiap bulan dan besarnya adalah 5% dari gaji pokok sebulan.

Pasal 14 : Tidak dapat disangkal bahwa ada perbedaan antara satu Perusahaan Daerah dengan yang lain. Untuk menjaga keseimbangan maka kepada Kepala Daerah diberi wewenang untuk mengatur penghargaan terhadap pegawai-pegawai tertentu berupa tunjangan Perusahaan tambahan.

Tunjangan ini diberikan kepada pegawai-pegawai tertentu berhubung dengan sifat pekerjaannya yang istimewa/khusus dan pula diadakan diperusahaan-perusahaan yang vital penting bagi Daerah.

Pasal 15 : Dalam tunjangan-tunjangan lain ini juga dimaksudkan antara lain tunjangan Hari Raya, tunjangan kemahalan setempat, tunjangan kematian, tunjangan kecelakaan, tunjangan bahaya, tunjangan pengobatan dan perawatan, tunjangan beras, tunjangan perumahan pegawai dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan sosial pegawai.

Penentuan besarnya tunjangan kemahalan setempat perlu ada peninjauan yang disesuaikan dengan keadaan harga kebutuhan hidup setempat pada tiap 6 bulan sekali.

Pasal 16 : Jika Perusahaan mendapat keuntungan positif kepada pegawai diberikan juga produksi (gratifikasi).

Penghargaan yang dimaksud dalam pasal ini dapat

bersifat materiil dan atau moril/spirituil.

Pasal 17 : Yang dimaksud dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal ini ialah pendapat Seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Urusan Kepegawaian / perburuhan.

Dalam menetapkan peraturan upah tersebut Kepala Daerah sudah sewajarnya mendegarkan juga usul-usul Biro Perusahaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan upah ini akan mengatur kedudukan upah bagi buruh-buruh Perusahaan Daerah yang bekerja tidak tetap (insidentil atau musiman) dalam Perusahaan.

Pasal 18 : Sudah jelas.

Pasal 19 : Sudah jelas.

Pasal 20 : Dalam melakukan penyesuaian ini supaya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 jo Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1961 dan dibentuk sebuah Panitia yang didalamnya duduk antara lain wakil dari Direksi dan S.S./S.B. Perusahaan.

Pasal 21 : Kepala Daerah dalam akan menjalankan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah ini mendengarkan lebih dulu pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Perusahaan/Biro Perusahaan dan Seksi Perburuhan/Kepegawaian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 22 : Sudah jelas.

Yogyakarta, 27 Mei 1968

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====
Seri A No. 8 a
Tahun 1968.

RALAT

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1963 tanggal 17 September 1963, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

I. Pada halaman 1:

Kalimat paling atas yang berbunyi:

"Yogyakarta, 27 September 1963"

seharusnya:

"Yogyakarta, 27 Mei 1968".

II. Pada halaman 7 :

Dibawah kata "SISWOSUMARTO" ditambah kalimat:

Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri A No. 8 Tahun 1968

Tanggal 27 - 5 - 1968

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

MOELJONO MOELIADI, SH."